

## Peran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dalam Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi<sup>1</sup>

Oleh  
Edy Pranoto<sup>2</sup>

### Abstrak

Perpustakaan Perguruan Tinggi berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi di mana perpustakaan tersebut bernaung. Pembinaan Ditjen Dikti terhadap Perpustakaan Perguruan Tinggi di berbagai bidang seyogyanya diselenggarakan lagi, sebab bila pembinaan dan pengembangan perpustakaan tersebut hanya mengandalkan perguruan tinggi yang bersangkutan, perkembangannya tidak secepat bila ada uluran tangan dari Ditjen Dikti. *Frame of Reference* antara pustakawan dan pengguna perpustakaan di perguruan tinggi seharusnya seimbang. Di perguruan tinggi punya program pendidikan jenjang Diploma, S1, S2, dan S3, karena itu bantuan bagi pustakawan untuk melanjutkan studi pada jenjang Pendidikan Diploma 3, S-1, dan S-2 Ilmu Perpustakaan seyogyanya diselenggarakan lagi mengingat sekarang sudah semakin banyak pustakawan di perguruan tinggi yang berpotensi untuk melanjutkan studi agar kualitas SDM-nya meningkat, yakni semakin profesional. Demikian pula bantuan pembelian buku-buku, langganan majalah ilmiah/jurnal seyogyanya terus diselenggarakan agar sumber informasinya semakin lengkap. Menyangkut pembinaan pendidikan jenjang Diploma, S-1, dan S-2 Ditjen Dikti dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan Jurusan Ilmu Perpustakaan, seperti UNDIP, UGM, UI, UNPAD, UNAIR, dan lain-lain. Menyangkut Diklat, Ditjen Dikti dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI yang telah mempunyai program-program Diklat dari jenjang terendah (tersingkat) sampai jenjang tertinggi (terlama).

Kata kunci: Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi

### Latar Belakang

Perpustakaan Perguruan Tinggi berperan sebagai penunjang pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi di mana perpustakaan tersebut bernaung, yakni menunjang dharma penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menyusuri sejarah berdirinya perguruan tinggi di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Taroepratjeko (1996: 1) bahwa di tahun 1950-an, karena keadaan politik, perguruan tinggi berdiri di setiap provinsi tanpa dilengkapi dengan segala sarana yang diperlukan. Belajar di perguruan tinggi yang sekadar mengandalkan catatan kuliah menjabar menjadi pengertian bahwa belajar di perguruan tinggi tidak memerlukan ketekunan menelusuri, membaca dan menyimpulkan literatur, tidak memerlukan sarana buku dan majalah ilmiah.

Keadaan yang digambarkan di atas kemudian berubah pesat, bahwa belajar di perguruan tinggi kini sangat memerlukan ketekunan menelusuri, membaca, menganalisis dan menyimpulkan. Sebagai konsekuensinya, tentunya Perpustakaan Perguruan Tinggi harus dilengkapi dengan sarana belajar yang memadai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi menyangkut perpustakaan pada pasal 27 butir 7 angka 10, pasal 34 ayat (2), pasal 55 ayat (1), pasal 69 ayat (1), pasal 82 ayat (1), dan pasal 95 ayat (1) pada dasarnya menyatakan bahwa perpustakaan adalah unsur penunjang yang perlu ada pada semua bentuk perguruan tinggi, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik maupun akademi. Karena Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menunjang pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi, maka semenjak orde baru pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi

---

<sup>1</sup> Pemenang Hiburan Ketiga Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan Tahun 2009

<sup>2</sup> Pustakawan Madya Universitas Negeri Semarang (UNNES)

dilaksanakan dengan memanfaatkan kerja sama luar negeri, seperti *The British Council*, *The Asia Foundation*, *USAID*, *Ford Foundation*, *NUFFIC*, dan lain-lain (Taroepratjeko, 1996: 3). Di samping itu, mulai Pelita I telah disediakan dana pembangunan pula untuk pengadaan buku-buku Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri. Selama 5 tahun Perpustakaan ITB telah dibina oleh *The British Council* melalui penempatan pustakawan ahli dari Inggris sebagai Kepala Perpustakaan pada awal tahun 1970-an, serta beberapa *volunteers* dari Inggris. *The Asia Foundation* telah menyumbangkan beberapa ribu judul kepada berbagai Perpustakaan Perguruan Tinggi. Kemudian, pada tahun 1993 koleksi Perpustakaan *The British Council* di Bandung dihibahkan kepada Perpustakaan ITB (Taroepratjeko, 1996: 4).

Tulisan ini mencoba mengungkap kembali bagaimana peran Ditjen Dikti dalam kerangka pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan maksud menggugah agar apa yang telah dilakukan Ditjen Dikti dilaksanakan kembali, sebab tanpa campur tangan Ditjen Dikti, atau dengan kata lain hanya mengandalkan dana yang ada di perguruan tinggi masing-masing nampaknya perkembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia kurang laras dengan perkembangan perguruan tingginya.

### **Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi 1970-1993**

Upaya-upaya pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi dilakukan pula untuk memperoleh dana bagi pembiayaannya. Dalam hal ini dilakukan pinjaman dana dari Bank Dunia pada tahun 1988 untuk pendidikan tinggi (7085-IND) yang kemudian disusun pengembangan *National Higher Education Library Network*. Dalam program ini, Perpustakaan pada 8 perguruan tinggi ditunjuk sebagai Pusat Layanan Disiplin Ilmu (Pusyandi) yang mengembangkan koleksi serta memberikan layanan dan sarana untuk 12 bidang ilmu, seperti kedokteran, teknologi, pertanian, kelautan, MIPA, ilmu-ilmu social, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Masing-masing Pusyandi dikembangkan untuk mampu memberikan pelayanan keperpustakaan maupun informasi lainnya dalam bidang ilmu tertentu kepada perguruan tinggi lain. Kemampuan ini diwujudkan dalam pengembangan, penyimpanan, pencarian dan pengiriman data, informasi maupun dokumen diantara anggota jaringan, yang dihubungkan dengan system UNINET yang juga dikembangkan dengan dana pinjaman Bank Dunia ini. Jaringan tersebut menghubungkan 43 perguruan tinggi negeri melalui Pusat computer masing-masing yang dihubungkan pula dengan perpustakaan (Taroepratjeko, 1996: 4).

Di samping itu, dalam program ini juga dikembangkan *University Library Tecnology Center* di Universitas Indonesia yang melakukan pengembangan, pelatihan, pemodelan dan memberikan konsultasi dalam pemanfaatan teknologi untuk perpustakaan, terutama melibatkan komputer dan sarana komunikasi (Taroepratjeko, 1996: 4).

Bersamaan dengan hal-hal tersebut di atas, juga dilakukan pengadaan 22.500 judul buku impor, berlangganan 750 judul jurnal ilmiah, dan upaya penerjemahan buku untuk 120 judul. Program yang dikembangkan dalam waktu 3 tahun ini telah dapat mencapai sebagian besar dari sasaran fisiknya, namun karena biaya operasi penggunaannya pada waktu itu (1991) masih sangat mahal, maka pengguna jaringan komunikasi tersebut sangat sedikit (Taroepratjeko, 1996: 4).

Upaya pengembangan ini dilanjutkan dengan dana pinjaman Bank Dunia tahun 1991 (3311-IND). Dalam program ini koleksi buku dan jurnal ilmiah terus dikembangkan di samping meningkatkan penggunaan CD-ROM untuk seluruh Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri. Dalam program ini dilakukan pendidikan di luar negeri untuk 30 orang program S-2 dan 30 orang pelatihan

singkat, serta pendidikan dalam negeri untuk 60 orang program S-1, 30 orang program S-2, dan 60 orang program Diploma-2. Di samping itu juga dilakukan pelatihan penggunaan komputer untuk perpustakaan pada 60 orang (Taroepatjeko, 1996: 4-5).

Dalam dana-dana pinjaman tersebut pengembangan Perguruan Tinggi Swasta lebih dipusatkan pada pengembangan sarana laboratorium bersama maupun pembinaan dosen. Namun demikian pelayanan dari Pusat-pusat Pelayanan Disiplin Ilmu (Pusyandi) terbuka bagi semua perguruan tinggi, dengan prosedur kerja sama yang sederhana (Taroepatjeko, 1996: 5). Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1979 telah menerbitkan Buku Pedoman mengenai Perpustakaan Perguruan Tinggi, berjudul:

1. Pedoman Umum Perpustakaan Perguruan Tinggi
2. Pedoman Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan Perguruan Tinggi
3. Pedoman Pembinaan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi
4. Pedoman Gedung dan Perlengkapan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pada tahun 1994, keempat buku pedoman tersebut disunting kembali dan disatukan menjadi Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman, edisi kedua (Taroepatjeko, 1996: 5).

Perpustakaan merupakan pusat pelayanan informasi ilmiah, di mana diperlukan kemampuan dalam proses mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mencari, dan mengirimkan informasi tersebut kepada pengguna, apakah itu berbentuk data, hasil pengolahan atau dokumennya. Permasalahan yang sering dihadapi adalah tidak tersedianya informasi yang memadai, tidak ada kemampuan maksimal untuk memprosesnya, serta tidak cukupnya motivasi pemroses untuk melayani keperluan pengguna dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, peranan pembina perpustakaan maupun pengguna juga sangat menentukan tingkat keefektifan fungsi perpustakaan (Taroepatjeko, 1996: 5).

Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam pembinaan Perpustakaan ini menyangkut berbagai pihak, yakni: (1) penyelenggara pendidikan tinggi; (2) penyelenggara perpustakaan, (3) pembinaan fungsi perpustakaan, dan (4) pembinaan pengguna perpustakaan (Taroepatjeko, 1996: 6).

Dalam kaitannya dengan penyelenggara pendidikan tinggi, selain telah ditetapkan dalam PP 30/1990 bahwa setiap perguruan tinggi harus mempunyai perpustakaan, dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0686/U/91 Pasal 11 ditetapkan bahwa untuk setiap program studi S-1 atau minimal 1 judul buku setiap mata kuliah dasar keahlian, 2 judul buku untuk setiap mata kuliah keahlian, berlangganan jurnal ilmiah, serta jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul. Untuk penyelenggaraan S-2 atau Spesialis-1 perlu dimiliki minimal 500 buku untuk setiap program (Taroepatjeko, 1996: 6).

Dalam kaitannya dengan penyelenggara Perpustakaan, pengembangan pendidikan Diploma dan S-1 Ilmu Perpustakaan terus dilakukan. Untuk pembinaan karier pustakawan telah dikembangkan jabatan fungsional pustakawan, dan untuk pembinaan Sistem Perpustakaan Perguruan Tinggi, telah dilakukan antara Perpustakaan Nasional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Nomor006/1993 dan 398/D/T/1993) (Taroepatjeko, 1996: 6).

Pembinaan pengguna Perpustakaan perlu diarahkan dan dikoordinasikan oleh pimpinan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan proses belajar mengajar. Penyelenggaraan penataran

PEKERTI (Pelatihan Keterampilan Teknik Instruksional), Pendekatan Terpakai (*applied approach*) dan sebagainya diharapkan dapat meningkatkan penggunaan buku acuan yang lebih intensif, penggunaan perpustakaan sebagai pusat pelayanan pencarian informasi maupun peningkatan fungsi pelayanan dari perpustakaan yang bersangkutan. Sementara itu, pelengkapan koleksi perpustakaan serta upaya pendekatan penyelenggara perpustakaan terhadap para penggunanya perlu ditingkatkan melalui peran serta pengguna dalam memberikan masukan/saran serta keterlibatan dalam upaya pengembangan Perpustakaan tersebut (Taroepatjeko, 1996: 6).

### **Harapan Sekarang dan Masa Mendatang**

Berbagai hal yang disampaikan oleh Taroepatjeko di atas merupakan gambaran bagaimana peran Ditjen Dikti dalam upaya pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut seyogyanya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia semakin mapan dan berkualitas dalam melakukan pelayanan informasi kepada segenap penggunanya. Tentunya harus diingat kembali, bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang berupa tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola secara sistematis dengan cara tertentu, untuk digunakan secara terus-menerus oleh penggunanya sebagai sumber informasi (Nurhadi, 1983: 4).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya ada lima unsur yang ada dalam suatu perpustakaan, yakni: (1) merupakan suatu unit kerja; (2) tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka; (3) koleksi bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu; (4) untuk digunakan secara terus-menerus oleh penggunanya; dan (5) sebagai sumber informasi (Nurhadi, 1983: 4).

Perpustakaan merupakan suatu unit kerja, mengandung pengertian bahwa suatu perpustakaan harus mempunyai status yang jelas sebagai unit kerja. Perpustakaan harus mempunyai komponen utama yang mendukung pelaksanaannya, yakni petugas, sarana dan dana. Petugas perpustakaan merupakan unsur manusiawi yang mengelola perpustakaan agar dapat berjalan secara dinamis. Unsur sarana diperlukan sebagai kelengkapan fisik untuk bekerja para petugasnya dan untuk menyediakan koleksi bahan pustaka bagi penggunanya, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, rak, almari, perlengkapan administrasi, dan sebagainya. Sedangkan dana diperlukan untuk mencukupi seluruh komponen yang lain dalam perpustakaan secara rutin. Tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi bahan pustaka mengandung arti, bahwa ada upaya dari perpustakaan untuk mengadakan koleksi bahan pustaka dan menyimpan serta memeliharanya. Pengadaan koleksi bahan pustaka bisa diperoleh dengan cara membeli, memperoleh secara gratis (hadiah), atau diperoleh dari sumbangan. Koleksi bahan pustaka tersebut bisa bermacam-macam, seperti buku, jurnal/majalah, dan kaset, film, *microfiche*, dan lain-lain.

Koleksi bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu, mengandung pengertian bahwa harus ada suatu sistem tertentu yang digunakan sebagai pegangan untuk mengatur dan mengelola koleksi bahan pustaka tersebut. Koleksi perpustakaan yang berkembang semakin banyak dan tidak diatur akan sulit dalam penemuan kembali. Sistem yang digunakan untuk mengatur koleksi bahan pustaka di Indonesia antara lain adalah DDC (*Dewey Decimal Classification*) dan UDC (*Universal Decimal Classification*).

Untuk digunakan secara terus-menerus oleh penggunanya, hal ini mengandung pengertian bahwa koleksi bahan pustaka yang telah dikumpulkan dan diatur secara sistematis dengan menggunakan sistem tertentu itu dimaksudkan agar dapat digunakan secara terus-menerus oleh

pengguna perpustakaan. Masing-masing perpustakaan kemungkinan berbeda karakteristik penggunaannya karena karakteristik yang dibawa oleh perpustakaan itu juga berbeda.

Kemudian, sebagai sumber informasi, mengandung pengertian bahwa penggunaan perpustakaan itu jelas untuk mendapatkan informasi. Koleksi bahan pustaka mengandung informasi yang sangat berguna bagi penggunaannya sesuai dengan kebutuhannya. Informasi tersebut bisa diperoleh dengan cara membaca, melihat, atau mendengar sesuai dengan karakteristik bahan pustaka yang digunakannya. Kalau ditilik pengertian perpustakaan dan penjabarannya sebagaimana disampaikan di atas, maka ada tiga hal yang amat penting untuk diperhatikan, yakni: (1) harus ada pembinaan koleksi yang terus menerus sarana yang memadai; (2) harus ada pengelola yang benar-benar profesional; dan (3) harus ada komunikasi antar pustakawan dengan penggunaannya.

#### **Harus ada pembinaan koleksi yang terus menerus dan penyediaan sarana yang memadai.**

Hal ini dikarenakan perguruan tinggi semakin berkembang maka diperlukan koleksi (buku, jurnal, dan sebagainya) yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pelaksanaan Tri dharma di perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun sarana digunakan sebagai penunjang pekerjaan petugasnya.

#### **Harus ada pengelola yang benar-benar profesional.**

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pekerjaan perpustakaan bukanlah pekerjaan yang sembarangan. Sebagai contoh bahwa koleksi bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu. Menguasai sistem tertentu yang digunakan sebagai pegangan untuk mengatur dan mengelola koleksi bahan pustaka tersebut (DDC, UDC, dll) sungguh sangat sulit, lebih-lebih koleksi perpustakaan berkembang semakin banyak. Pengelolaan koleksi tersebut harus dilakukan oleh pustakawan yang berwawasan luas dan mempunyai kualifikasi pendidikan kepustakawanan yang tinggi.

#### **Harus ada komunikasi antar pustakawan dengan penggunaannya.**

Hal ini dimaksudkan agar informasi yang terkandung dalam semua jenis koleksi dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para penggunaannya. Misalnya, sebagaimana diketahui bahwa di Perpustakaan Perguruan Tinggi ada satu bagian layanan yang disebut layanan referensi atau layanan rujukan yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau permintaan informasi dari penggunaannya dengan menggunakan koleksi referensi. Layanan referensi ini dalam realisasinya berkembang menjadi layanan informasi, namun jarang dikenal dosen dan mahasiswa, bahkan belum dipahami benar oleh petugas perpustakaan sendiri. Pada umumnya dosen dan mahasiswa jarang bertanya kepada petugas referensi (*reference librarian*) mengenai ada tidaknya informasi yang sedang dibutuhkannya. Sebaliknya, petugas referensi sendiri hanya dapat menjawab “ada” dan “tidak ada”, atau “di sana” saja tanpa pertanggungjawaban, artinya, ia tidak dapat menjawab secara tuntas terhadap permintaan informasi para dosen dan mahasiswa. Dialog dengan para dosen dan mahasiswa yang kebetulan memerlukan informasi hampir tidak pernah dilakukan (atau memang sengaja tidak dilakukan), karena memang untuk menemukan informasi di sumber apapun memerlukan kerja keras dan modal pengetahuan yang luas mengenai berbagai sumber informasi.

Jadi, dalam layanan referensi harus dilakukan oleh petugas yang profesional yang punya wawasan yang luas, dan pandai berkomunikasi dengan pengguna perpustakaan. Petugas referensi memang harus memenuhi persyaratan khusus yang bisa dibilang istimewa, seperti yang ditulis oleh Wilson dan Tauber dalam bukunya *The University Library* yang diterbitkan pada tahun 1966: “*He should have thorough knowledge of reference procedure. This calls for a wide*

*knowledge of reference tools and other material. He should be able to use efficiently card catalogs, bibliographies, book lists, indexes, dictionaries, encyclopedias and abstracts. He should have thorough knowledge of aims of library services, he should understand the principles and procedure of library organization; and he should be able to integrate these effectively with educational objectives and procedures of the university. Familiarity with foreign languages, extensive knowledge of foreign literatures, appreciation of the history of scholarship, and understanding of methods and spirit of research, and knowledge of the educational and research program of the institution are likewise indispensable for the reference librarian. In addition, he should be able to bring his varied abilities to bear upon the solution of the problems of students and faculty members; and since his work is so closely related to that of students and faculty, he should be possess teaching ability of a high order”* (Ia seharusnya mempunyai berbagai pengetahuan tentang prosedur referensi, hal ini diperlukan pengetahuan yang luas tentang alat-alat referensi dan materi-materi lainnya. Ia seharusnya mampu menggunakan secara efektif dari kartu-kartu catalog, bibliografi, daftar buku, indeks, amus, ensiklopedi dan abstrak. Ia seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas tentang tujuan pelayanan perpustakaan, ia seharusnya mampu memahami prinsip-prinsip dan organisasi perpustakaan, ia seharusnya dapat memadukannya secara efektif dengan tujuan pendidikan dan tata cara yang berlaku di universitasnya, akrab dengan bahasa asing, mempunyai pengetahuan tentang literatur asing, mengetahui riwayat ilmu pengetahuan, memahami metode dan makna penelitian dan mempunyai pengetahuan tentang program-program pendidikan di universitas adalah syarat yang diperlukan bagi seorang pustakawan referensi. Demikian pula, ia seharusnya mampu mencurahkan segenap kemampuannya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan dosen aampai tuntas mengenai kebutuhan informasi, ia seharusnya mempunyai kemampuan membimbing bagaimana menemukan informasi).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa layanan referensi belum banyak dikenal masyarakat pembaca perpustakaan, bahkan belum disadari oleh petugasnya sendiri sehingga layanan referensi berjalan ala kadarnya. Demikian pula Koleksi bahan pustaka mengandung informasi yang sangat berguna bagi penggunaannya sesuai dengan kebutuhannya belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para pengguna perpustakaan.

Uraian di atas merupakan indikator, bahwa pada hakikatnya ada kebutuhan esensial Perpustakaan Perguruan Tinggi yang terus menerus harus dibina dan ditingkatkan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penunjang pelaksanaan dharma-dharma di perguruan tinggi di mana perpustakaan tersebut bernaung, dan tentunya, pembinaan ini perlu dilakukan oleh Ditjen Dikti. Menyangkut pembinaan pendidikan jenjang Diploma, S-1, dan S-2 Ditjen Dikti dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan Jurusan Ilmu Perpustakaan, seperti UNDIP, UGM, UI, UNPAD, UNAIR, dan lain-lain. Menyangkut Diklat, Ditjen Dikti dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI yang telah mempunyai program-program Diklat dari jenjang terendah (tersingkat) sampai jenjang tertinggi (terlama).

## **Penutup**

Perpustakaan Perguruan Tinggi berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi di mana perpustakaan tersebut bernaung. Pembinaan Ditjen Dikti terhadap Perpustakaan Perguruan Tinggi di berbagai bidang yang pernah dilakukan dalam kurun 1970-1994 seyogyanya diselenggarakan lagi, sebab bila pembinaan dan pengembangan perpustakaan tersebut hanya mengandalkan perguruan tinggi yang bersangkutan, perkembangannya tidak secepat bila ada uluran tangan dari Ditjen Dikti.

*Frame of Reference* antara pustakawan dan pengguna Perpustakaan seharusnya seimbang. Di perguruan tinggi punya program pendidikan jenjang Diploma, S1, S2, dan S3, karena itu bantuan bagi pustakawan untuk melanjutkan studi pada jenjang Pendidikan Diploma 3, S-1, dan S-2 Ilmu Perpustakaan seyogyanya diselenggarakan lagi mengingat sekarang sudah semakin banyak pustakawan di perguruan tinggi yang berpotensi untuk melanjutkan studi agar kualitas SDM-nya meningkat, yakni semakin professional. Demikian pula bantuan pembelian buku-buku, langganan majalah ilmiah/jurnal seyogyanya terus diselenggarakan agar sumber informasinya semakin lengkap.

### Daftar Pustaka

- Indonesia. Perpustakaan Nasional. 1988. *Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya: Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33/1998, dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 1998, Nomor 59 Tahun 1998*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Djajuliyanto dkk. 1991. *Himpunan Lengkap 1951-1990 Peraturan Perundang-undangan tentang Perpustakaan dan Perbukuan di Indonesia*. Jakarta: BP. Muara Agung.
- Harrod, Leonard Montague; Raymond John Pryterch. 1984. *Harrod's Librarians Glossary of Term Used in Librarianship, Documentation and the Book Crafts and Reference Book*, 5<sup>th</sup> ed. Aldershot: Gower.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/ MENPAN/12/2002 dan Keputusan Bersama: Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003, Nomor 21 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- The Library Association. 1974. *Tugas-tugas Profesional dan Nonprofesional di Perpustakaan (Professional and Nonprofessional Duties in Libraries)*, 2<sup>nd</sup> ed. London: The Library Association.
- Nurhadi, Mulyani A. 1983. *Sejarah Perpustakaan dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Taroepratjeko, Harsana. 1996. "Upaya dan Kebijakan Depdikbud Dalam Mengembangkan Perpustakaan Lembaga Pendidikan Tinggi". *Makalah disampaikan dalam Semiloka Empat Hari tentang Meningkatkan Kinerja Perpustakaan Lembaga Pendidikan Tinggi di Aula Perpustakaan Nasional RI, 11 November -14 November 1996*. Tidak Diterbitkan.
- Wilson, Louis Round; Maurice P. Tauber. 1966. *The University Library: Administration and Facilities of Academic Libraries*, 2<sup>nd</sup> ed. New York: Columbia University.

---